

“Tema 6: Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan”

**DAMPAK PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PADA
MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh

Dijan Rahajuni, Suprpto, Sri Lestari, Lilis Siti Badriah

Email: dijan_rahajuni@yahoo.com

ABSTRAK

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 mencapai 18,44% lebih tinggi 7,22% dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional yang mencapai 11,22%. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) yang sekarang diganti menjadi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Tujuan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Penelitian ini dilakukan pada kelompok masyarakat miskin eks penerima manfaat program PNPM-MP yang tergabung dalam keswadayaan Masyarakat (KSM) ekonomi program PNPM-MP dengan tujuan untuk mengkolaborasikan pencapaian 0 persen permukiman tanpa kumuh dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil *forum group discussion* penelitian dilakukan melalui tindakan pemanfaatan lingkungan kumuh untuk kegiatan ekonomi produktif, dengan menanam tanaman apotik hidup dan warung hidup. Hasil penelitian berdampak luas pada masyarakat, bukan saja pada pengurangan lingkungan kumuh dan peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kearifan lokal dalam hal ini adalah kerja sama dan kerukunan dan juga mendidik generasi muda untuk cinta lingkungan.

Kata kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Program Kotaku, Gerakan 100-0-100, Keswadayaan Masyarakat Ekonomi, kearifan lokal.*

ABSTRACT

The poverty rate in Banyumas Regency in 2015 reached 18.44% higher by 7.22% compared to the national poverty rate which reached 11.22%. Various poverty alleviation programs have been launched by the government, one of which is the National Urban Community Empowerment Empowerment Program (PNPM-MP) which has now been changed to the Kotaku Program (City without Slums). The aim of the Slum City Program (Kotaku) is to accelerate the handling of slum settlements in Indonesia and support the "100-0-100 Movement", which is 100 percent universal access to drinking water, 0 percent slums, and 100 percent decent sanitation access. This research was carried out on the poor community ex-PNPM-MP program beneficiaries who joined the community self-reliance (KSM) program in PNPM-MP with the aim of collaborating on the achievement of 0 percent without slum settlement and empowering communities to increase income and

reduce poverty. Based on the results of the Forum Group Discussion the research was carried out through the use of slum environments for productive economic activities, by planting live pharmacy plants and living stalls. The results of the research have a broad impact on the community, not only on reducing the slum environment and increasing income but also on increasing local wisdom, in this case, is cooperation and harmony and also educates young people to love the environment.

Keywords: Community Empowerment, Kotaku Program, 100-0-100 Movement, Economic Community Self-Reliance, local wisdom.

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Indonesia dalam bidang ekonomi adalah memajukan kesejahteraan umum. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1994 melalui Inpres Desa Tertinggal sampai dengan sekarang. Namun demikian jumlah penduduk miskin masih relatif banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (2015) pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 % dibandingkan kondisi September 2014 yang berjumlah 27,73 juta orang (10,96 persen). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 mencapai 18,44% lebih tinggi 7,22% dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional yang mencapai 11,22%. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2014 sebesar 8,16%, naik menjadi 8,29%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masih belum optimal.

Beralihnya model Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) menjadi Kotaku yang sudah dipersiapkan pada April 2016 (surat Konsultan Manajemen Pusat No. 097/KMP.Wil.1/IV/2016 tanggal 7 April 2016 tentang persiapan pelaksanaan Kotaku), memerlukan juga perhatian pada pola pengelolaan Keswadayaan Masyarakat (KSM) Ekonomi yang sudah ada, mengingat : (1). Potensi KSM Ekonomi yang sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu melibatkan banyak kelompok ekonomi dimana setiap kelompok rata-rata beranggotakan lima sampai 15 orang; (2). Dana pinjaman bergulir yang masih berlangsung di masyarakat cukup banyak dan harus dijaga keberlanjutannya. Permasalahannya adalah : (1) Selama ini model pengelolaan KSM Ekonomi masih belum terpolakan dengan jelas, ini terlihat dari jumlah KSM yang dalam kategori lancar hanya 19,9%; (2). Upaya pengentasan kemiskinan perkotaan pada program PNPM – MP melalui kegiatan ekonomi masih terfokus pada kegiatan pemberian pinjaman pada kelompok-kelompok masyarakat miskin. Penelitian Dijan R dan Lilis SB

(2011) menemukan hanya sekitar 50% peminjam pinjaman bergulir pada program PNPM – MP memanfaatkan pinjaman untuk kegiatan ekonomi produktif. Pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan konsumtif dapat menimbulkan ketergantungan yang justru akan lebih memberatkan masyarakat. Oleh karena itu penting ditentukan model untuk membuat masyarakat miskin lebih mandiri sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimilikinya;

(3). Diperlukan perubahan kebijakan untuk menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Selama ini tolok ukur keberhasilan program hanya dilihat berdasarkan kelancaran pengembalian pinjaman dan kemampuan dalam pemupukan modal pinjaman bergulir pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat Kelurahan; (4). Dikaitkan dengan program Kotaku, maka diperlukan strategi untuk dapat mengkolaborasikan antara program PMPN-MP yang masih diminati oleh masyarakat penerima manfaat dengan program Kotaku.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan *studi kasus* pada PNPM-Mandiri Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

2. Populasi Penelitian

Eks penerima manfaat program PNPM-PM yang tergabung dalam KSM Ekonomi.

3. Sampel Penelitian

Sampel penelitian yaitu : pengelola program PNPM – MP dari tingkat kabupaten sampai dengan kelurahan, fasilitator, kelompok masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Pengambilan sampel dengan metode *purposive random sampling*, pada wilayah yang terdeteksi berada pada kawasan kumuh perkotaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas No.050 / 1444 / Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kawasan kumuh ringan dan kawasan kumuh sedang, masing-masing kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur.

4. Responden penelitian

Responden penelitian adalah masyarakat penerima manfaat program PNPM-MP yang tergabung dalam KSM, untuk masing-masing kelurahan diambil 10 persen jumlah kelompok. Jumlah sampel dan responden penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Sampel dan Responden Penelitian

No	Kategori Kumuh	Kelurahan	Kelompok	Jumlah Anggota (Responden)
1	Kumuh Ringan	Kedungwuluh	1. Kusuma	10
			2.Surya Mas	4
			3.Boga Lestari II	5
			4.Anggrek Putih	5
			5.Laskar Sejati	4
			6.Wreda Utama	13
Jumlah				41
2	Kumuh Sedang	Purwokerto Lor	1.Kenangan IV	12
			2.Cempaka III	15
			3.Mawar 3 G	12
Jumlah				39
Meninggal 1 orang				38

Sumber: Dokumen penelitian, 2018.

5. Metode pengambilan dan pengolahan data

- 1). Data Sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka terkait PNPM Mandiri Perkotaan.
- 2). Data Primer diperoleh dengan menggunakan teknik *in-depth interview*, *Focus Group Discussion*, observasi, dan survei kepada penanggungjawab pengelola kegiatan dari tingkat kabupaten sampai tingkat Kelurahan.
- 3). Metode pengolahan data
 Data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode reduksi data, displai data, dan kategori data. Kategorisasi data didasarkan pada metode analisis komparasi (Moleong, 2001).
- 4). Metode penyajian dan analisis data
 Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk teks naratif, yakni suatu uraian yg sistematis, logis, dan rasional sesuai dengan urutan/posisi kepentingan data. Di samping itu data akan disajikan pula dalam bentuk matrik, yakni suatu penyajian data dalam bentuk tabel yang diisi dengan uraian kata-kata dengan hasil wawancara maupun pengamatan.

5). Uji mutu data

Uji mutu data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, kemudian juga dengan triangulasi metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama kegiatan penelitian adalah melakukan FGD dengan unsur yang terkait dengan lingkungan hidup, yaitu dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, penyuluh pertanian dari Kecamatan Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur, Ketua BKM Kelurahan Purwokerto Barat dan Kelurahan Purwokerto Timur, dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang berminat terhadap studi lingkungan, dan para penerima manfaat program PNPM-MP yang tergabung dalam KSM sampel pada penelitian tahun pertama, tenaga administrasi penelitian, dan mahasiswa yang membantu kegiatan penelitian.

Penerima manfaat dari Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat sebagai responden pada penelitian tahun pertama berjumlah 41 orang, yang hadir dalam kegiatan FGD sebanyak 36 orang atau 88 persen, dan dari Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur responden pada penelitian tahun pertama berjumlah 38 yang hadir dalam kegiatan FGD berjumlah 24 orang atau 63 persen. Secara keseluruhan dari 79 responden penelitian pada tahun pertama yang dapat hadir sebanyak 60 atau 76 persen. Data kehadiran peserta FGD dapat dilihat pada Tabel 2.

Forum Group Discussion (FGD) meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program KOTAKU yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan penataan, yaitu: 1. Bangunan; 2. Jalan Lingkungan; 3. Drainase Lingkungan; 4. Penyediaan Air Bersih/Minum; 5. Pengelolaan Persampahan; 6. Pengelolaan Air Limbah; 7. Pengamanan Kebakaran; dan 8. Ruang Terbuka Publik. Keberhasilan program Kotaku harus berdampak dan melibatkan masyarakat penerima program.

Tabel 2. Daftar Hadir Forum Grups Discussion Penelitian KOTAKU

No	Kehadiran dari Unsur	Jumlah (orang)	Persentase
1	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	1	0,01
2	Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas	1	0,01
3	Penyuluh Peranian Kecamatan	2	0,02
4	Ketua BKM	2	0,02
5	Penerima manfaat Kelurahan Kedungwuluh	36	0,42
6	Penerima manfaat Kelurahan Purwokerto Timur	24	0,28
7	Tenaga administrasi	1	0,1
8	Mahasiswa pembantu penelitian	3	0,03
9	Dosen IESP yang berminat	15	0,18
	Tenaga Kebersihan	2	0,02
	Jumlah yang hadir	85	100

Sumber: Dokumen penelitian, 2018.

Dalam FGD ditemukan hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait dengan lingkungan secara mandiri adalah menjaga kebersihan, kesegaran, dan ketertibannya dalam kehidupannya sehari-hari dan secara berkelompok melalui RT dan RW di wilayah pemukinannya dengan berkerja bakti yang harus dilakukan terjadwal secara rutin. Selama ini sistem kerja bakti dilakukan masyarakat hanya pada waktu-waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut FGD menyimpulkan bahwa yang dapat dilakukan secara rutin oleh masyarakat untuk menjaga supaya lingkungan tidak kumuh dan segar adalah dengan melakukan pengelolaan sampah pribadi dan keluarga dan pemanfaatan lingkungan hidup. Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh Dijan Rahajuni, Suprpto dan Nunik Kadarwati (2015) mengenai nilai ekonomi sampah, menghasilkan bahwa pengelolaan sampah secara kelompok ternyata dapat meningkatkan pendapat kelompok dan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat. Namun dalam FGD ditemukan bahwa masyarakat sudah merasa nyaman dengan melakukan pengelolaan sampah secara berbayar karena responden tidak memikirkan lagi dimana tempat pembuangan sampah akhir yang akan dituju dan bagaimana dampak lingkungan di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, kondisi luas rumah rata-rata 91,5 meter persegi dengan luas terendah 56 meter persegi dan terluas 200 meter persegi. Rata-rata

luas hunian per individu 20 meter persegi dengan rata-rata luas hunian tersebut kalau menurut standar tingkat kemiskinan dari BPS sebenarnya sudah termasuk kategori penduduk miskin. Dilihat dari kondisi halaman rumah mereka, dalam arti ruang terbuka yang menyatu dengan rumah tempat tinggal terdapat 18 responden atau 30 persen yang tidak memiliki halaman, dan rumah mereka berhimpitan dengan rumah tetangga. Berkaitan dengan tanah pekarangan yang mereka miliki, tanah pekarangan diartikan sebagai tanah yang ada disekitar rumah, sebanyak 33 responden atau 55 persen tidak memiliki tanah pekarangan. Namun demikian responden yang memiliki tanah pekarangan, kepemilikan tanah pekarangan mereka rata-rata mencapai 40,25 meter persegi. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan tanah responden tidak merata.

Hasil FGD mengenai pemahaman responden terkait dengan program Kotaku dan lingkungan hidup menunjukkan mereka memahami bahwa dengan pengelolaan lingkungan yang baik akan dapat memberikan kesenangan, kesegaran, kesejukan, keindahan, manfaat ekonomi (memenuhi kebutuhan, mengurangi pengeluaran belanja, sebagai tabungan), untuk menjaga kesehatan, mengurangi polusi dan terjaganya kebersihan. Namun demikian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sebagian besar responden menyatakan tidak punya lahan. Hal lain yang dikeluhkan responden adalah saluran pembuangan air limbah, kurangnya kesadaran warga dalam pembuangan sampah, tanah-tanah kosong yang tidak diurus dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Tanah-tanah kosong ditengah pemukiman yang tidak diurus oleh pemiliknya ini mengganggu kenyamanan lingkungan, karena terlihat kotor dan dijadikan tempat pembuangan sampah.

Bagi responden yang memanfaatkan lingkungannya pada umumnya dimanfaatkan untuk menanam tanaman kategori apotik hidup (kunyit, jahe, kencur, lidah buaya, dan sirih), warung hidup (kucai, terong, cabe, kemangi, terong dan katuk), tanaman buah-buahan (kelengkeng, pepaya, rambutan, jambu, belimbing, pisang, anggur, alpukat, sri kaya, mangga), tanaman hias (gelombang cinta, anggrek, palm, mawar). Namun demikian dari 60 responden terdapat 13 responden (22 persen) yang sama sekali tidak memiliki tanaman. Rata-rata jenis tanaman yang dimiliki responden 7 jenis, responden yang memiliki jumlah tanaman sedikit 1 (satu) dan yang paling banyak 100. Rata-rata nilai tanaman yang dimiliki responden, menurut penilaian responden sebesar Rp148.617,00 dengan nilai ekonomi rata-rata Rp134.042,00 setiap bulannya. Rata-rata waktu yang

digunakan oleh responden untuk mengurus tanamannya adalah seminggu sekali dengan lama waktu waktu rata-rata 30 menit.

Untuk mengidentifikasi bagaimana kelompok menerapkan pengelolaan lingkungan, maka diadakan penilaian yang meliputi kesiapan kelompok, kesiapan lahan, motivasi kelompok, kebersihan lingkungan, jumlah varietas tanaman, tingkat kesuburan, pemanfaatan limbah, hasil tanaman, dan tingkat kepuasan kelompok. Adapun unsur penilai adalah mahasiswa dari Fakultas Pertanian 2 (dua) orang, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 1 (satu) orang, tim peneliti yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan 1 (satu) orang dari Jurusan Manajemen.

Rekapitulasi hasil kegiatan yang dilakukan melalui penilaian pada kelompok yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali menunjukkan bahwa 2 (dua) kelompok di Kelurahan Purwokerto lor, yaitu kelompok KSM Mawar 3G dan kelompok KSM Anggrek IV ternyata sangat lemah. Menurut mereka, hal ini terjadi karena kesibukan, kelompok tidak pernah mengadakan pertemuan kecuali kalau mau mengadakan pengajuan pinjaman, tanah dan kompos mahal, tidak punya lahan. Sedangkan untuk kelompok KSM Maju Mapan yang juga berada di Kelurahan Purwokerto Lor kegiatan pemanfaatan pekarangan dilakukan secara berkelompok pada lahan kosong milik salah seorang warga setempat, yaitu bu Doddy dan beliau selalu memotivasi dan memacu semangat warga untuk memanfaatkan lahan. Di Kelurahan Kedungwuluh upaya pengelolaan dan pemanfaatan lahan dilakukan secara berkelompok pada lahan sepanjang jalan aliran irigasi di RW 7, dan di lahan pekarangan perumahan Dinas Perhubungan yang sudah tidak ditempati lagi di KSM RW 8, dan dilahan pekarangan warga yang sekaligus juga merupakan tokoh masyarakat yaitu pak Sarjito, di kelompok KSM RW 2.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sasaran adalah : 1). Lingkungan menjadi bersih dan nyaman dipandang; 2). Manfaat ekonomi yang diperoleh adalah hasil tanaman dapat dinikmati bersama dan ada juga yang dapat dijual. Hasil tanaman yang dinikmati bersama dilakukan dengan cara membagi hasil panen kepada anggota kelompok dan atau memberikan keleluasaan bagi anggota kelompok yang membutuhkan. Hal ini berarti dapat merurangi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga anggota kelompok. Hasil tanaman yang dijual dimasukan ke dalam kas kelompok sebagai dana kegiatan sosial ekonomi bersama.

Hasil sampingan yang tidak terduga sebelumnya adalah : 1). Adanya peningkatan kerukunan sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat kegiatan menjaga perkembangan dan kelestarian lingkungan, pembagian hasil panen yang tidak dijual kepada non anggota; 2). Menanamkan rasa cinta lingkungan kepada generasi muda. Hal ini terlihat pada keikutsertaan anak-anak anggota kelompok dalam menjaga dan memelihara lingkungan; 3). Menumbuhkan kerja sama dalam keluarga dan masyarakat, karena kegiatan memanfaatkan lingkungan juga melibatkan kaum laki-laki.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Keberhasilan program Kotaku harus melibatkan setiap unsur dalam masyarakat. Keberhasilan program Kotaku berdampak luas pada masyarakat, bukan saja pada lingkungan tanpa kumuh dan meningkatkan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kearifan lokal dalam hal ini adalah kerja sama dan kerukunan, mendidik generasi muda untuk cinta lingkungan.

2. Implikasi

Untuk menunjang keberhasilan program Kotaku diperlukan sosialisasi program secara intensif, pemerintah lokal dan tokoh masyarakat perlu memberikan dukungan, mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berpartisipasi terhadap program, menumbuhkan kepercayaan kemanfaatan program dan membuat jaring pengikat kerjasama antar masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak atas dukungannya, baik material maupun non material, dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: Direktorat, Riset dan Pengabdian Masyarakat Dikti Republik Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyumas, Segenap jajaran kelembagaan eks PNPM-MP mulai dari Asisten Kota, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Pemerintah dan masyarakat Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan

Purwokerto Barat, dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Mahasiswa yang membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. *Pedoman umum PNPM Mandiri*. PNPM Mandiri.
- _____. 2011. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)*. Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.
- _____. 2016. *Laporan pelaksanaan bulan Maret 2016*. PNPM-MP Kabupaten Banyumas-Propinsi Jawa Tengah.
- Dijan Rahayuni, E. S. Gunawati, dan Suprpto. 2009. *Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas*. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Jenderal Soedirman-Purwokerto.
- Dijan Rahayuni. 2012. Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Di Kabupaten Banyumas. *Solusi*, Vol. 11 No. 3 / Juli 2012.
- Dijan Rahayuni, H. Sambodo, R. Indranjoto, dan L.S. Badriah. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Dijan Rahajuni, Suprpto, Rusmusi IMP, 2015. The Cooperation Institutional to Strengthen the KSM PNPM Mandiri Rural Community to Improving Economic Independence (Case Study in Banyumas District), *I J A B E R*, Vol. 13, No. 7 (2015) 5595-5606.
- Gunawan Sumodiningrat, 2002, *Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan*, Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM. Yogyakarta.
- Haryadi, L. Budiarti, D. Rahajuni, S. Lestari, and R.P. Setyanto. 2016. Proposed Management Model of PNPM Mandiri: Lesson Learned from PNPM Mandiri at Banyumas Regency Postcompletion of PNPM Program. *I J A B E R*, Vol. 14, No. 1, (2016): 209-221
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosda karya. Bandung.
- <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>, diakses 17-10-2018